**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI *PUBLIC CHANNEL***

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Diajukan Oleh:

**Yuninda Maulida Anwar**

**NIM. 1808015088**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI *PUBLIC CHANNEL***

Diajukan Oleh:

Yuninda Maulida Anwar

NIM. 1808015088

Laporan Hasil Penelitian ini telah disetujui oleh para Dosen Pembimbing

Di Samarinda pada tanggal 13 Juli 2022

PEMBIMBING UTAMA, PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H. ,K.N., M.H. Lily Triyana, S.H., M.Hum.

NIP 197305292002122001 NIP 198109252008122001

MENGETAHUI,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN,

K. Wisnu Wardana, S.H.M.H.

NIP. 198001252005011005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuninda Maulida Anwar

NIM : 1808015088

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini penulis menyatakan bahwa terkait laporan hasil penelitian milik penulis dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui *Public Channel*”** merupakan hasil karya penulis, yang pada penulisan penelitian ini tidak ada terdapat karya sebelumnya yang telah diajukan dalam memperoleh Gelar Kesarjanaan di Perguruan Tinggi, serta sepanjang sepengetahuan dari penulis tidak ada terdapat pula karya ataupun pendapat sebelumnya yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang telah tertulis pada naskah ini serta disebutkan didalam daftar pustaka.

 Samarinda, Mei 2022

Yuninda Maulida Anwar

Nim. 1808015088

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Yuninda Maulida Anwar, lahir di Kabupaten Bone pada tanggal 15 Juni 2000. Merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Hairil Anwar dan Ibu Musdalia. Mengawali jenjang pendidikan TK di Aisyiyah Aba III kemudian sekolah dasar di SD 005 Samarinda Ulu selesai pada tahun 2012, kemudian sekolah menengah pertama di SMPN 4 Samarinda dan menyelesaikan di tahun 2015, serta kembali mengawali pendidikan pada sekolah menengah atas di SMAN 5 Samarinda, dan lulus di Tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda dengan konsentrasi Hukum Perdata. Pada bulan Juni hingga Juli tahun 2021, mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Mulawarman, di Pengadilan Negeri Samarinda. Alamat email yunindamaulida123@gmail.com.

KATA PENGANTAR

Penyusunan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang wajib untuk dijalani dan dipenuhi oleh mahasiswa guna menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Pembahasan dalam skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Telegram terhadap unggahan film bajakan melalui *Public Channel*. Telegram merupakan aplikasi yang memiliki fasilitas berupa *Public Channel* yang dapat menyebarkan konten berukuran besar hingga 1,5 GB per filenya seperti film, sangat disayangkan *Public Channel* tersebut digunakan untuk mengunggah film-film bajakan yang merugikan pemegang hak cipta.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, sehingga besar harapan penulis agar diberikan kritik, saran, dan masukan guna menyempurnakan penulisan dalam penelitian penulis. Semoga skripsi ini bias memberikan banyak manfaat untuk banyak pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 13 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Yuninda Maulida Anwar

NIM. 1808015088

PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT semesta alam penulis panjatkan, atas segala nikmat dan karunia-Nya, karena begitu besar pertolongan, berkat, dan rahmat-Nya selama melakukan penulisan skripsi yang dimulai dari awal sampai akhir selesai penulisan serta penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kendala yang dihadapi , namun kembali bersyukur berkat doa dan dukungan kedua orang tua, saudara, serta dosen-dosen dan juga teman-teman selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Penulisan skripsi ini memiliki maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan penulis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Mulawarman. Penulis menyadari penuh bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa arahan, dan bimbingan berbagai pihak, sehingga dengan seluruh kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih dengan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya M.Si. selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Bapak Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Bapak Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.
4. Ibu Rika Erawaty, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
5. Ibu Erna Susanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
6. Bapak K. Wisnu Wardana, S.H. M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
7. Ibu Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H., K.N., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
8. Ibu Lily Triyana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tanpa terkecuali yang telah memberikan pengajaran ilmu pengetahuan di bidang Hukum serta bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
10. Kedua orang tua penulis, kakak, dan adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Temen-teman seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Nadya Brithania Pusvitha, Laila Nur Hidayah, Laila Israfiyanti Putri, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. Sahabat yang selalu membantu dalam proses perkuliahan dari awal semester hingga dalam penyelesaian tugas akhir saya yaitu Muh. Galih Elrianda Wijaya.
13. Sahabat yang sudah seperti saudara Rizka Yediana yang selalu ada dalam susah maupun senang dalam keadaan apapun selama proses penulisan skripsi.
14. Teman-teman semasa SMP Nabila, Cindy, Bella, Tasya yang selalu memberikan masukan serta semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman semasa Sekolah Menengah Atas yang turut memberikan semangat Winchy Putri Cantika, Dhea Amanda, Norsa Mellinia, Nadia Lestari yang sangat berperan dalam memberikan semangat agar tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman saya sedari Sekolah Dasar hingga saat ini Winchy Putri Cantika yang selalu memberikan masukan dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman kelas B angkatan 2018 yang banyak memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
18. Senior Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang juga membantu memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi.
19. Kepada diri saya sendiri yang selalu berusaha dan tidak menyerah dalam menjalankan perkuliahan selama di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.

Akhir kata, penulis dengan seluruh kerendahan hati sangat menyadari pada penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan sehingga sangat mengharapkan saran dan kritik membangun agar menjadi masukan bagi skripsi ini untuk menjadi lebih baik. Semoga hasil skripsi ini bisa mendatangkan manfaat untuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, serta penulis turut mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT akan membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini, Amiin.

Samarinda, 25 Juli 2022

(Yuninda Maulida Anwar)

DAFTAR ISI

[LAPORAN HASIL PENELITIAN i](#_Toc113015211)

[LEMBAR PERSETUJUAN ii](#_Toc113015212)

[SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iii](#_Toc113015213)

[RIWAYAT HIDUP PENULIS iv](#_Toc113015214)

[KATA PENGANTAR v](#_Toc113015215)

[PERSEMBAHAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH vi](#_Toc113015216)

[DAFTAR ISI x](#_Toc113015217)

[DAFTAR GAMBAR xi](#_Toc113015218)

[ABSTRAK xii](#_Toc113015219)

[*ABSTRACT* xiii](#_Toc113015220)

BAB I [PENDAHULUAN 1](#_Toc113015222)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc113015223)

[B. Rumusan Masalah 4](#_Toc113015224)

[C. Tujuan Penelitian 4](#_Toc113015225)

[D. Manfaat Penelitian 5](#_Toc113015226)

[E. Keaslian Penelitian 5](#_Toc113015227)

[F. Landasan Teori 7](#_Toc113015228)

[G. Metode Penelitian 12](#_Toc113015229)

[1. Pendekatan Penelitian 12](#_Toc113015230)

[2. Sumber Bahan 13](#_Toc113015231)

[3. Analisis Bahan 14](#_Toc113015232)

[4. Alokasi Waktu 14](#_Toc113015233)

[BAB II](#_Toc113015234) [BENTUK PELANGGARAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN 15](#_Toc113015235)

[A. Fakta Mengenai Aplikasi Telegram 15](#_Toc113015236)

[B. Bentuk Pelanggaran Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui Public Channel 25](#_Toc113015237)

[BAB III](#_Toc113015238) [PERTANGGGUNGJAWABAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI PUBLIC CHANNEL 34](#_Toc113015239)

[A. Bentuk Tanggungjawab Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui Public Channel 34](#_Toc113015240)

[B. Penyelesaian Sengketa Atas Unggahan Film Bajakan Yang Terjadi Melalui Public Channel Telegram 42](#_Toc113015241)

[BAB IV](#_Toc113015242) [PENUTUP 54](#_Toc113015243)

[A. Kesimpulan 55](#_Toc113015244)

[B. Saran 55](#_Toc113015245)

[DAFTAR PUSTAKA 56](#_Toc113015246)

DAFTAR GAMBAR

ABSTRAK

**Yuninda Maulida Anwar, 1808015088, Bone 15 Juni 2000. “Pertanggungjawaban Hukum Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui *Public Channel*” dibawah bimbingan Ibu Emilda Kuspraningrum dan Ibu Lily Triyana.**

Telegram merupakan bentuk dari suatu penyelenggara sistem elektronik yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang mengandung karakter normatif yang bertujuan untuk mengkaji dua pokok pembahasan yaitu menganalisis bentuk pelanggaran hukum Telegram terhadap unggahan film bajakan dan pertanggungjawaban hukum Telegram terkait pembajakan film berhak cipta melalui aplikasi Telegram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan pihak Telegram ialah penyelenggaraan sistem elektroniknya telah menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang dilanggar hak ekonominya. Pertanggungjawaban hukum Telegram ialah wajib memastikan sistem elektroniknya agar tidak memuat dokumen yang dilarang dalam hal ini adalah film-film bajakan yang diunggah melalui *Public Channel* Telegram. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan disebutkan pula pada ayat (2) bahwa penyelenggara sistem elekronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Telegram, *Public Channel*, Pelanggaran Hukum.**

ABSTRACT

***Yuninda Maulida Anwar, 1808015088, Bone 15 June 2000. “Telegram's Legal Liability Against Pirated Movie Uploads Through Public Channel” Under the guidance Mrs. Emilda Kuspraningrum and Mrs. Lily Triyana.***

*Telegram is a form of an electronic system operator who is responsible for the operation of the electronic system. The research approach is carried out using a doctrinal approach that contains a normative character which aims to examine two main topics of discussion, namely analyzing the form of Telegram's legal violations against pirated film uploads and Telegram's legal liability related to piracy of copyrighted films through the Telegram application. The results of the study indicate that the form of legal violation by Telegram is that the implementation of its electronic system has caused losses to copyright holders whose economic rights have been violated. Telegram's legal responsibility is to ensure that its electronic system does not contain documents that are prohibited in this case being pirated films uploaded through Telegram's Public Channel. As stated in Article 5 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions in article 5 paragraph (1) which states that the electronic system operator is obliged to ensure that the electronic system does not contain electronic documents that are prohibited in accordance with the provisions of the law, and it is also stated in paragraph (2) that the electronic system operator must ensure that the electronic system does not facilitate the dissemination of electronic information and/or electronic documents that are prohibited in accordance with the provisions of the legislation.*

***Keywords:* Telegram, *Public Channel*, *Law Violation***

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.[[1]](#footnote-1) Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi bagi dunia perfilman di Indonesia adalah pembajakan film melalui aplikasi kirim pesan yaitu aplikasi Telegram. Telegram merupakan aplikasi kirim pesan yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer maupun telepon selular. Telegram merupakan wujud penyelenggara sistem elektronik yang sedang marak digunakan dan pengguna aktif bulanan Telegram naik signifikan hingga lebih dari 500 juta sejak awal Januari 2021.[[2]](#footnote-2)

Pembajakan film melalui aplikasi Telegram dilakukan dengan cara mengunggah film bajakan pada *Public Channel* Telegram sehingga film tersebut dapat diakses oleh pengguna Telegram lainnya. Pembajakan menurut UUHC adalah penggandaan ciptaan serta pendistribusian secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Film merupakan salah satu karya intelektual yang sangat rawan terjadi pembajakan padahal pada proses menciptakannya tentu membutuhkan tenaga, biaya, waktu serta pikiran. Mengingat bahwa menciptakan karya merupakan hal yang tidak mudah maka sangat perlu untuk dihargai, sebagaimana dijelaskan dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa masyarakat wajib untuk menghargai hak cipta orang lain.

Salah satu film yang mengalami pembajakan melalui *Public Channel* pada aplikasi Telegram ialah serial Layangan Putus yang merupakan film produksi WeTV. Serial Layangan Putus merupakan salah satu serial yang mengalami pembajakan yang sangat parah, hal tersebut diungkapkan oleh Lesley Simpson Country Head WeTV dan Iflix di Indonesia. Bahkan Lesley mengatakan bahwa kerugian yang dirasakan sangat besar hingga ekuivalen dengan biaya produksi.[[3]](#footnote-3) Adanya pembajakan melalui Telegram, royalti atau keuntungan yang menjadi hak dari pemilik hak cipta tidak didapatkan sebagaimana seharusnya.[[4]](#footnote-4)

Mengenai penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, lebih lanjut mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan disebutkan pula pada ayat (2) bahwa Penyelenggara Sistem Elekronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban dalam mengawasi dan memastikan agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memuat dan memfasilitasi penyebaran dokumen elektronik yang dilarang sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Film bajakan merupakan salah satu dokumen yang dilarang karena kegiatan pembajakan film tersebut merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Sebagaimana kerugian yang ditimbulkan menurut Pasal 1367 KUHPerdata dinyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pertanggungjawaban pihak Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik merupakan suatu hal yang penting demi memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta yang telah dijamin dalam Undang-undang.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hukum Telegram terhadap unggahan film bajakan melalui *Public Channel* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Telegram terkait unggahan film bajakan yang terjadi melalui *Public Channel* ?
3. Tujuan Penelitian

Didalam penulisan bertujuan untuk dapat menjawab dua hal :

Pertama*,* penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pelanggaran hukum pihak aplikasi Telegram terhadap unggahan film bajakan yang terjadi melalui fasilitas berupa *Public Channel* yang ada pada aplikasi Telegram. Pada pembahasan ini diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum pihak aplikasi Telegram terhadap unggahan film bajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua*,* penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum aplikasi Telegram terkait pembajakan film berhak cipta melalui aplikasi Telegram. Pertanggungjawaban dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban hukum Telegram menurut peraturan perundang-undangan yang ada dan dari segi keperdataan.

1. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yaitu :

1. Secara Akademis/Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengembangan terhadap disiplin ilmu terutama ilmu hukum khususnya mengenai hak cipta perfilman dan pertanggungjawaban aplikasi Telegram terhadap unggahan film bajakan yang terjadi pada aplikasinya. Penelitian ini turut diharapkan agar digunakan menjadi bahan bacaan atau referensi bagi pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian.

1. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pertimbangan serta saran dan/atau masukan kepada pembaca terkhusus masyarakat dan pihak pihak yang terlibat dalam terjadinya peristiwa pembajakan film melalui *Public Channel* pada aplikasi Telegram. Hal tersebut guna mencapai tujuan untuk penghargaan perfilman dan nilai hak cipta serta kesejahteraan perekonomian di Indonesia.

1. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, untuk menghindari plagiaris terhadap penelitian dengan masalah yang sama. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Revi Astuti. 2021. Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Group Chat Pada Aplikasi Telegram*.* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Dalam Skripsi ini, penulis berfokus dalam membahas bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan karya sinematografi yang berupa film dan web series pada sebuah grup chat di aplikasi pengirim pesan yaitu aplikasi telegram.

Persamaan pada riset penelitian yang ditulis penulis yaitu menganalisis mengenai aplikasi yang sama yaitu aplikasi Telegram. Perbedaan riset pada penelitian yang ditulis oleh penulis ini yaitu terdapat pada pembahasan yang akan berfokus mengenai pertanggungjawaban hukum pihak aplikasi Telegram terhadap maraknya unggahan film bajakan yang terjadi melalui aplikasinya.

1. Muhammad Mughni Rais. 2016. Perlindungan Hak cipta Karya Film Terhadap Website Penyedia Jasa Download/Streaming Film Gratis Dalam Media Internet. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam Skripsi ini, penulis berfokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi terhadap website penyedia jasa download/streaming Film Gratis. Persamaan riset penelitian dengan penulis yaitu mengenai pembajakan yang dilakukan melalui Penyedia Jasa secara digital. Perbedaan riset pada penelitian yang ditulis oleh penulis ini yaitu pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum yang lebih berfokus pada *public channel* Telegram terkait unggahan film bajakan.
2. Landasan Teori
3. Teori Pebuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort.* Kata *tort* sendiri sebenarnya hanya berarti salah *(wrong)*. Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak.

Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :[[5]](#footnote-5)

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan menggantikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan.[[6]](#footnote-6) Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu. Sebagaimana Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Dengan kata lain, antara kerugian dan perbuatan harus ada hubungan sebab akibat yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pelakunya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian). Dalam hal ini Telegram telah lalai dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan aplikasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta.

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.[[7]](#footnote-7) Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.[[8]](#footnote-8)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu;

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.[[9]](#footnote-9)

KUHPerdata menentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang- orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Maka pihak telegram bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta karena kelalaiannya dalam mengawasi dan memastikan adanya pembajakan film yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya.

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theori van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.[[10]](#footnote-10)

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[[11]](#footnote-11) Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Ada beberapa teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*.[[12]](#footnote-12)

Teori *reward* (penghargaan) menurut Robert M. Sherwood memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atau pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.[[13]](#footnote-13) Pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menhasilkan penemuan atau ciptaan.

Menurut teori *recovery,* pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu, biaya harus diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut.

Menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi.

Menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

1. Hak cipta

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.[[14]](#footnote-14)

Di Indonesia persoalan terkait hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep dasar hak cipta yang dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.[[15]](#footnote-15) Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah suatu ciptaan, mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomi yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.[[16]](#footnote-16)

1. Metode Penelitian
2. Pendekatan Penelitian

Pada pelaksanaan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif (doktrinal). Pendekatan doktrinal yang dimaksud adalah penelitian berbasiskan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian doktrinal dilihat dari sisi aplikasi juga dilihat dari aspek *academic constituency* yaitu menganalisis teori hukum (*legal theory*), ilmu hukum (*jurisprudence*), dan filsafat hukum (*legal philosopy*).[[17]](#footnote-17) Selain itu, penilitian ini juga menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga data yang digunakan berupa data sekunder.

Penelitian ini meliputi analisis mengenai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Telegram terhadap unggahan film bajakan yang terjadi melalui *Public Channel*. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Peneliti juga mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, makalah, seminar, bahan-bahan terkait yang di dapat peneliti dengan membaca jurnal, surat kabar, bahan bacaan lepas lainnya, serta pada beberapa situs website melalui internet lalu dianalisis.

1. Sumber Bahan

Bahan doktrinal yang diperoleh melalui buku pribadi yang dimiliki Penulis serta tersedianya *e-book* di website serta dari teori hukum, asas hukum, jurnal hukum dan artikel hukum yang menjadi referensi dari penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat, yakni bahan hukum yang mengatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum Telegram terhadap unggahan film bajakan melalui *Public Channel*. Seperti yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sebagainya.

1. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan data media elektronik.

1. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa inggris.

1. Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara doktrinal untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian :

Rumusan Masalah (R1):

Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik terkait pembajakan film yang terjadi melalui fitur *Public Channel* yang ada pada aplikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rumusan Masalah (R2):

Bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak Telegram dalam hal unggahan film bajakan yang terjadi melalui aplikasi Telegram, pertanggungjawaban dalam hal ini dianalisis melalui segi keperdataan.

1. Alokasi Waktu

Alokasi waktu penelitian akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai dari penyusunan desain riset, seminar desain riset, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan dan publikasi.

BAB II

BENTUK PELANGGARAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN

1. Fakta Mengenai Aplikasi Telegram

Telegram merupakan aplikasi layanan berkirim pesan instan multiplatform berbasis cloud yang bersifat gratis yang dapat diakses melalui media elektronik seperti computer maupun telepon selular. Telegram juga merupakan wujud dari penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[[18]](#footnote-18) Penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.[[19]](#footnote-19)

Aplikasi Telegram yang diciptakan oleh wirausahawan asal Rusia bernama Pavel Durov pada tahun 2013 merupakan aplikasi layanan pengirim pesan instant yang multiplatform bersifat gratis dan privat. Kehadiran aplikasi Telegram diterima oleh masyarakat di dunia, terbukti pengguna aktif bulanan Telegram sudah mencapai lebih dari 500 juta sejak awal Januari 2021.

Terdapat pengguna baru berasal dari seluruh dunia, yakni 38% dari Asia, 27% dari Eropa, 21% dari Amerika Latin, dan 8% dari Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).[[20]](#footnote-20) Kenaikan yang drastis terhadap pengguna aplikasi Telegram dikarenakan mengunduh dan mengakses Telegram untuk melihat film ilegal dapat dilakukan dengan cara yang mudah.[[21]](#footnote-21) Salah satu kelebihan dari aplikasi Telegram yaitu terdapat pada fitur *global search* yang berfungsi untuk mencari *public channel* yang saat ini marak disalah gunakan oleh pengguna aplikasi Telegram untuk mengunduh dan menonton film berhak cipta secara gratis. Telegram menyediakan fitur “*Public Channel*” yaitu ruang menyampaikan pesan (*broadcast*) kepada jumlah pengguna yang tidak terbatas dan dapat mengirimkan file berukuran besar hingga 1,5 GB per filenya.

Cara membuat *public channel* pada aplikasi Telegram sangatlah mudah, berikut cara membuat *channel* Telegram :

1. Buka menu hamburger di sudut kiri atas aplikasi Telegram
2. Pilih ‘saluran baru/*channel* baru’ (dengan ikon siaran)
3. Masukkan nama saluran yang akan dibuat dan deskripsi saluran yang akan dibuat sesuai *opsional.*
4. Atur sesuai kegunaannya apakah *channel* tersebut untuk publik atau pribadi.

Mudahnya pembuatan *public channel* menimbulkan fakta bahwa fitur ini disalahgunakan oleh pengguna aplikasi telegram untuk membuat *public channel* dengan tujuan menyebarluaskan karya cipta berupa film yang dilakukan secara gratis dan tanpa izin Pemilik/Pemegang Hak.

Sebagai suatu karya, film merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan bahwa Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan.

Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

Kemampuan internet yang kian canggih sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan penyebaran, pendistribusian karya berhak cipta dapat menjadi kekhawatiran bagi banyak pihak khususnya pemegang hak cipta. Seseorang dapat dengan mudah membuat *Public channel* dan menyampaikan pesan *broadcast* berupa file sharing suatu karya cipta dalam format digital dan semua pengguna Telegram yang telah mengikuti maupun tidak mengikuti *channel* tersebut dapat dengan mudah mengakses karya cipta yang terdapat di dalamnya baik untuk ditonton secara langsung maupun untuk diunduh terlebih dahulu. Pengguna aplikasi Telegram hanya memerlukan kuota data internet atau wifi kemudian mendownload Telegram dan kemudian melakukan pencarian jenis film yang ingin di saksikan dan akan langsung menemukan *public channel* yang menyediakan film untuk disaksikan tanpa biaya sepeserpun.

Kecanggihan fitur yang disediakan dan mudahnya akses terhadap berbagai karya cipta tersebut serta tingginya biaya menonton di bioskop menyebabkan penyebaran dan penggandaan suatu ciptaan secara ilegal terus meningkat dan menimbulkan kerugian materil bagi para pemilik/pemegang Hak Cipta. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam menghargai suatu karya cipta juga menjadi faktor yang mendukung terus terjadinya pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu.[[22]](#footnote-22) Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.

Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyakan film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Pelanggaran terhadap film berhak cipta yang merupakan karya sinematografi ini tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan baik secara moril dan materil. Pembajakan film yang saat ini marak terjadi melalui media internet tentunya mempengaruhi penghasilan para pihak pemegang hak cipta yang seharusnya mendapatkan royalti sesuai jumlah yang seharusnya didapatkan. Pada pasal 9 Undang-undang hak cipta dinyatakan bahwa hak ekonomi merupakan suatu hak yang diberikan oleh pemerintah untuk mengapresiasi pencipta yang telah menuangkan ide kreatifitasnya.

Terkait pembajakan secara digital yang terjadi pada aplikasi bernama Telegram. Kegiatan streaming maupun mengunduh film tidak berbayar atau secara gratis dilakukan tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli dalam memperbanyak karya filmnya hal tersebut terjadi melalui fasilitas berupa *public channel* yang ada pada aplikasi kirim pesan Telegram.

Pemilik dari suatu *Public Channel* mendapatkan film-film bajakan tersebut dari beberapa situs illegal lain yang kemudian dikirim ulang ke dalam suatu *Public Channel* untuk disebar luaskan agar dapat ditonton oleh pengguna Telegram yang mengakses Public Channel tersebut.

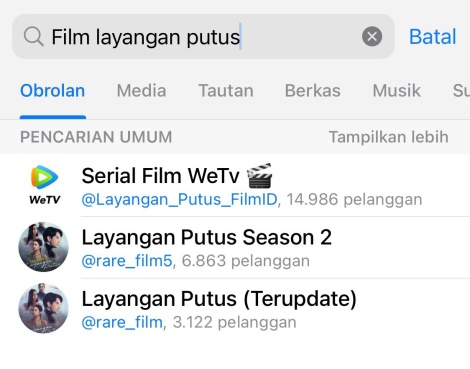
Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi terjadinya penyebaran, pendistribusian hak cipta secara luas dan mudah, hal tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak khususnya pihak pencipta maupun pemegang hak cipta. Dalam hal pembajakan film yang terjadi melalui aplikasi Telegram dilakukan melalui fitur pencarian umum yang mana fitur tersebut dapat membantu pengguna Telegram untuk mencari suatu *public channel*. *Public channel* merupakan salah satu fasilitas yang ada pada aplikasi Telegram berupa suatu kelompok chat dengan sistem *subscribers* yang dapat mengirimkan pesan secara massal dan dalam hal ini banyak disalahgunakan oleh pengguna untuk berbagi film-film bajakan yang diunggah melalui *public channel* tersebut.

Telegram merupakan wujud dari Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[[23]](#footnote-23) Menurut UU ITE pasal 15 ayat (2) penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya maka pihak Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik turut bertanggungjawab terhadap maraknya unggahan film bajakan yang dilakukan melalui sistem elektroniknya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap film berhak cipta. Faktanya pihak Telegram belum memberikan perlindungan karena film bajakan sangat mudah ditemui melalui aplikasinya hanya dengan cara mengetik judul dan para pengguna akan menemukan berbagai macam *Public Channel* yang menyediakan film tersebut.

(Gambar 2.1) Berikut merupakan fitur pencarian umum yang menampilkan beberapa Public Channel yang menyediakan film-film bajakan



**Sumber : Telegram**



Salah satu rumah produksi yang turut merasakan kerugian dari maraknya pembajakan film melalui aplikasi Telegram adalah WeTv. Salah satu film yang di unggah secara ilegal melalui *public channel* Telegram adalah film Layangan Putus yang di produksi oleh WeTV, disampaikan oleh Lesley Simpson Country Head WeTV dan Iflix Indonesia, serial layangan putus menjadi yang paling banyak dibajak dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dari segi keuangan dan sangat menciderai industri perfilman.[[24]](#footnote-24) Selain itu masih banyak film-film lainnya yang diunggah secara ilegal melalui *Public Channel* Telegram.

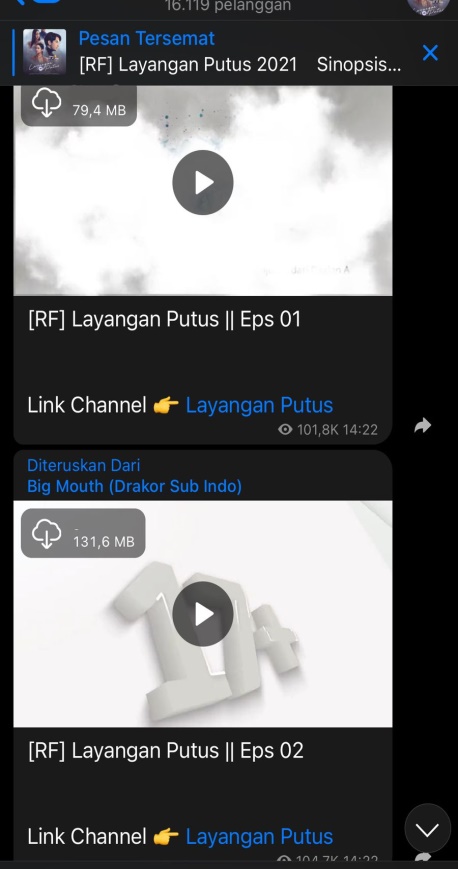
Berikut bukti *screenshoot* beberapa film yang dibajak melalui aplikasi Telegram :

(Gambar 2.2) Layangan Putus menjadi film yang paling banyak dibajak sehingga pihak produksi film sangat merasa dirugikan dan meminta pemerintah untuk memblokir aplikasi Telegram.



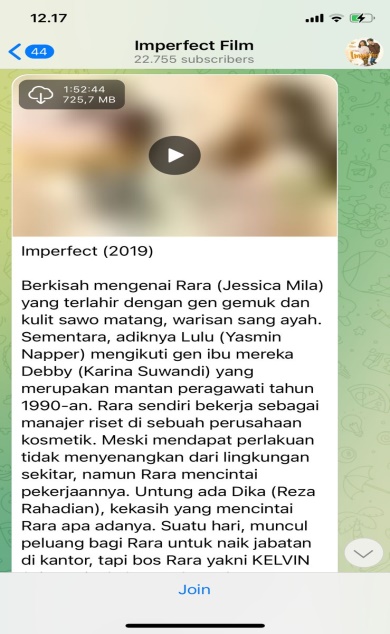
**Sumber : Kompas.com**

(Gambar 2.3) Series Layangan Putus, merupakan salah satu film yang hanya ditayangkan di aplikasi resmi WeTv di unggah secara ilegal pada Public Channel Telegram.

Sumber : Telegram

(Gambar 2.4) Gambar dari suatu Public Channel yang mengunggah sebuah film yang seharusnya disaksikan melalui bioskop menjadi dapat disaksikan melalui Public Channel Telegram.

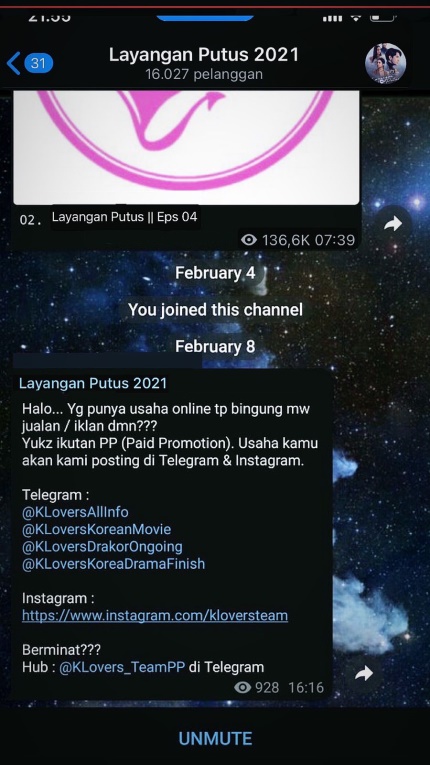


Sumber : Telegram

Terdapat kenaikan yang drastis terhadap pengguna aplikasi Telegram dikarenakan mengunduh dan mengakses telegram untuk melihat film ilegal dapat dilakukan dengan cara yang mudah.[[25]](#footnote-25) Adanya *public channel* pada aplikasi Telegram memudahkan masyarakat mengakses film bajakan dengan mudah dengan cara bergabung dengan berbagai *Public Channel* yang tersedia pada aplikasi Telegram. Keuntungan apabila bergabung pada *Public Channel* adalah mendapatkan notifikasi apabila ada film baru yang diunggah dan dapat menontonnya secara gratis.

Pengertian pembajakan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta yang dimaksud pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi dalam hal ini pemilik *Public Channel* mendapatkan keuntungan ekonomi dari penyebaran film bajakan dengan cara mengumpulkan pelanggan sebanyak-banyaknya agar bergabung pada *Public Channel* yang telah dibuat bahkan beberapa *Public Channel* ada yang memiliki puluhan ribu pelanggan, kemudian pemilik *Public Channel* tersebut dapat menawarkan untuk melakukan *paid promote* maupun *endorsement* melalui *Public Channel* yang dimilikinya dan mematok harga untuk setiap postingannya agar mendapatkan keuntungan.

(Gambar 2.5) salah satu Public Channel melakukan penawaran apabila pengguna ingin melakukan Paid Promote/promosi berbayar.



**Sumber : Telegram**

Dengan adanya film-film bajakan yang diunggah melalui *Public Channel* tentunya akan menarik pengguna Telegram untuk mengunjungi *Public Channel* tersebut dan semakin banyak pengguna maupun pelanggan yang tergabung dalam *Public Channel* tersebut maka pemilik *Public Channel* dapat mengambil keuntungan dengan cara menyediakan jasa promosi dan bagi pihak yang ingin melakukan promosi atau mengiklankan sesuatu melalui *Public Channel* tersebut membayar kepada pemilik *Public Channel*. Kurangnya pengawasan dan longgarnya aturan yang ada memicu pengguna Telegram untuk membuat *Public Channel* dengan tujuan meraup keuntungan dan hal tersebut tentunya mendukung penyebab terus melonjaknya jumlah pengguna aplikasi Telegram yang membajak film melalui aplikasi tersebut.

Semakin banyaknya media menonton dan mengunduh film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui media tersebut. Padahal, menonton film gratis melalui aplikasi tersebut dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara ilegal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah.

1. Bentuk Pelanggaran Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui Public Channel

Dalam bahasa inggris, perbuatan melawan hukum disebut dengan tort yang memiliki arti kesalahan. Kata *tort* sendiri berasal dari kata latin yaitu *torquere* atau *tortus* yang berarti kesalahan atau kerugian tertentu. Subekti dan Tjitrosudibio menuliskan tentang perbuatan melanggar hukum sebagaimana tertera pada pasal 1365 KUH Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum, akan membawa kerugian bagi pihak lain, wajib bagi orang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan”[[26]](#footnote-26). Menurut Munir Fuady mengenai perbuatan melawan hukum terdapat tiga kategori dan dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :[[27]](#footnote-27)

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Dalam permasalahan yang terjadi, pihak Telegram telah lalai memantau aktifitas penggunanya karena sampai saat ini sudah banyak *public channel* yang sengaja dibentuk untuk menyebarkan film secara ilegal yang merugikan pihak pencipta dan pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.[[28]](#footnote-28) Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Pihak Telegram dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kausalitas antara kerugian dan perbuatan, dan adanya kerugian. Telegram seharusnya wajib melakukan pengawasan dan memastikan agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak menimbulkan kerugian. Tindakan memperbanyak dan mengumumkan karya oleh pihak yang tidak memegang hak cipta dilakukan melalui fasilitas yang seharusnya diawasi oleh pihak Telegram telah menimbulkan kerugian material bagi pemegangnya, berdasarkan hal tersebut maka pelanggaran hak cipta yang terjadi pada kasus Telegram dapat dikategorikan berdasarkan perbuatan melawan hukum sehingga perlu dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa unsur dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum yaitu:

* 1. Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya.[[29]](#footnote-29)

Telegram sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki aturan mengenai kewajibannya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, aturan tersebut terdapat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang dan wajib memastikan bahwa penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran dokumen elektronik yang dilarang, dalam hal ini dokumen elektronik yang dilarang adalah film bajakan. Dalam hal ini unsur perbuatan telash terpenuhi karena Telegram belum melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik.

* 1. Melawan Hukum

Makna melawan hukum pada masa lalu ditafsirkan secara sempit yaitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang.[[30]](#footnote-30) Pihak Telegram memiliki kewajiban untuk turut melindungi Hak Cipta Film yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan disebutkan pula pada ayat (2) bahwa Penyelenggara Sistem Elekronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai dokumen elektronik yang dilarang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Dokumen Elektronik yang dilarang dengan klasifikasi:

* 1. Melanggar ketentuan perundang-undangan;
  2. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
  3. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Dalam hal ini masih terdapat dokumen elektronik yang dilarang berupa film yang dibajak melalui *Public Channel* yang ada pada aplikasi Telegram.

* 1. Kerugian

Pembajakan film melalui fasilitas yang ada pada aplikasi Telegram telah menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena dalam suatu karya film terdapat hak moral maupun hak ekonomi pencipta yang dilanggar sehingga pemegang hak cipta tidak mendapatkan royalti karena kegiatan pembajakan tersebut. Hak moral pencipta terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta yang berbunyi:

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kerugian materiil berupa tidak terpenuhinya *royalti* yang patut di terima atas hasil karyanya, merupakan bagian dari Hak Ekonomi pencipta yang terkandung dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, yang berbunyi: Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

* 1. Kesalahan

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian, dan
3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, sepeti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Maraknya pembajakan film yang terjadi pada aplikasi Telegram seharusnya membuat pihak Telegram sadar dan mengatahui bahwa telah terjadi pembajakan film dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya hal tersebut dapat dikatakan karena telah didapati keluhan dari para pihak pemegang hak cipta film yang merasa sangat dirugikan akibat dari filmnya yang diunggah secara ilegal melalui aplikasi Telegram.

* 1. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Dalam pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga perbuatan orang-orang dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, dalam hal ini Telegram merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang seharusnya wajib memastikan agar tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang berupa film yang diunggah tanpa izin sehingga melanggar hak ekonomi pencipta. Hal tersebut wajib dilakukan telegram agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dikarenakan kelalaian yang dilakukan pihak Telegram merugikan pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang filmnya tersebar dan dapat diakses pada *public channel* aplikasi Telegram. Terlebih berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, dipertegas kembali yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”[[32]](#footnote-32) Selanjutnya, pengertian dan konsep kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan pengertian dan konsep kelalaian dalam bidang hukum pidana. Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Dalam hal ini pihak Telegram belum menjalankan kewajiban berupa memastikan tidak adanya konten yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pemegang hak cipta. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tentang “tidak berbuat”. Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan” secara klasik dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:[[34]](#footnote-34)

1. *Nonfeasance*, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*, merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. *Malfeasance*, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Selanjutnya, dalam Pasal 1367 KUHPerdata dinyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Maka dalam hal ini pihak Telegram dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur yang telah diuraikan diatas yaitu unsur perbuatan melawan hukum dan juga unsur kelalaian. Pihak Telegram dapat dimintai pertanggungjawaban karena kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban berupa pengawasan pada penyelenggaraan sistem elektroniknya sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang dilanggar hak ekonominya.

BAB III

PERTANGGGUNGJAWABAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI PUBLIC CHANNEL

1. Bentuk Tanggungjawab Telegram Terhadap Unggahan Film Bajakan Melalui Public Channel

Telegram merupakan salah satu wujud dari penyelenggara sistem elektronik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian Penyelenggara Sistem Elektronik menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Penyelenggara sistem elektronik privat adalah penyelenggara sistem elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk (Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kominfo 5/2020):

1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (contoh: Tokopedia, Shopee, Bukalapak);
2. Menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan (contoh: OVO, GoPay, Dana);
3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna sistem elektronik (contoh: Netflix, Disney+ Hotstar, Ruangguru);
4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial (contoh: LINE, WhatsApp, Telegram);
5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya (contoh: Google, YouTube, Spotify);
6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.[[35]](#footnote-35)

Menurut Pasal 15 ayat (2) undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Mengenai kewajiban Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 dinyatakan :

1. Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
2. Penyelenggara sistem elekronik wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai kriteria dokumen elektronik yang dilarang terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:

* 1. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
  3. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Berdasarkan peraturan terkait maka Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban berupa memastikan sistem elektroniknya agar tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang dan tidak memfasilitasi penyebarluasan dokumen elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu film-film yang diunggah secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Unggahan film-film bajakan ini terjadi melalui fasilitas yang ada pada penyelenggaraan sistem elektronik Telegram yaitu melalui *Public Channel* yang digunakan secara terang-terangan untuk mengunggah film-film bajakan yang tentunya merugikan pihak pemegang hak cipta yang dilanggar hak ekonominya. Pihak Telegram sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki kewajiban seharusnya memperketat pengawasan agar tidak terdapat penyebaran dokumen elektronik yang dilarang seperti film-film bajakan dalam penyelenggaraan aplikasinya, pihak Telegram merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan memiliki kemampuan untuk memastikan tidak adanya unggahan-unggahan film bajakan melalui penyelenggaraan aplikasinya.

Unggahan film bajakan pada *Public Channel* Telegram umumnya dilakukan oleh dan diantara para pengguna. Namun demikian, pada prinsipnya Telegram juga memiliki kewajiban hukum dalam penyelenggaraan aplikasinya yang berperan sebagai media atau perantara yang menyimpan konten dalam sistemnya maka berdasarkan kewajiban tersebut muncul pertanggungjawaban bagi pihak Telegram.

Tanggung jawab penyelenggara sistem yang berfungsi sebagai perantara atau intermediasi, yaitu tanggungjawab atas kegiatan yang terkait dengan keberadaan data/informasi yang bersifat melawan hukum *(illegal content)* yang terdistribusi di internet *(liability based on content),* yang antara lain mencakup:

1. tanggung jawab terhadap ciptaan digital/*digital works* *(copyrighted materials),*
2. tanggung jawab terhadap informasi yang melanggar kesusilaan masyarakat *(obscenity and indecency),* dan
3. tanggung jawab terhadap informasi yang bersifat mencemarkan reputasi atau nama baik *(defamation).[[36]](#footnote-36)*

Dalam hal ini pertanggungjawaban Telegram terhadap konten yang bersifat melawan hukum adalah tanggung jawab terhadap ciptaan digital/*digital works (copyrighted materials).* Untuk membatasi pertanggungjawaban platform perantara *(intermediasi)* terhadap konten-konten yang tersebar di dalamnya, Amerika Serikat memiliki doktrin *safe harbour* sebagaimana tertuang dalam *section* 512, *title* 17 *US Code (Digital Millenium Copyright Act of* 1998 / “DMCA”). Ketentuan pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan doktrin *safe harbour* dapat diterapkan terhadap penyedia layanan aplikasi sepanjang telah melakukan beberapa tindakan, salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Penyedia aplikasi adalah menyediakan suatu sistem dan mekanisme pengaduan adanya pelanggaran hak cipta.

Ekosistem Telegram memang ramah terhadap pelanggaran hak cipta sehingga perlindungan hukumnya harus dilakukan secara intens. Untuk menangani adanya pelanggaran hak cipta, Telegram menyediakan fasilitas Telegram DMCA *Anti-Piracy Solutions* yang dapat diakses pada laman https://www.telegramdmca.com. dimana Pemilik/Pemegang hak cipta dapat mengajukan laporan pengaduan secara langsung kepada pihak Telegram dan meminta penghapusan konten yang melanggar hak cipta. Telegram mengklaim bahwa penghapusan konten tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu 48 jam.

Pada tahun 2020 Telegram digugat oleh salah satu perusahaan luar negeri yaitu Jagran Prakashan Limited yang tercantum pada Putusan Pengadilan Tinggi Delhi No. CS (COMM) 146/2020 Pada Kasus Jagran Prakashan Limited vs Telegram Fz LLC & Ors Tertanggal 29 Mei 2020.

Jagran Prakashan Limited (Penggugat) merupakan perusahaan media di India yang menerbitkan koran Dainik Jagran dalam bentuk fisik maupun digital yang dapat diakses pada portal website miliknya dengan cara berlangganan *(subscription).* Penggugat memiliki sistem keamanan khusus sehingga setiap orang yang telah berlangganan dapat membaca koran dalam bentuk digital di portal web tetapi tidak dapat mengunduh koran tersebut dalam format pdf. Kemudian Penggugat menemukan setidaknya 9 (sembilan) channel pada Aplikasi Telegram (Tergugat I) yang mengedarkan surat kabar Penggugat dalam format pdf secara gratis. Melalui channel tersebut pengguna Telegram dapat mengakses dan mengunduh semua koran digital edisi sebelumnya yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang berlangganan koran Penggugat.

Penggugat menilai bahwa Tergugat 1 telah memberikan akses dan izin kepada pengguna aplikasi untuk membuat channel tanpa mengungkapkan identitas pengguna tersebut sehingga identitas pemilik channel-channel tersebut tidak diketahui. Penggugat telah memberikan 4 (empat) notifikasi kepada Tergugat I namun tidak satu notifikasi tersebut ditanggapi. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I sebagai penyedia layanan intermediary dan pemilik channel yang tidak diketahui identitasnya sebagai Tergugat II. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya dengan alasan bahwa Tergugat merupakan penyedia layanan perantara. Oleh karena itu, Tergugat 1 melalui tergugat II terlibat dalam mereproduksi, mengadopsi, mendistribusikan, mentransmisikan dan menyebarkan surat kabar elektronik Penggugat.

Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memerintahkan Tergugat I untuk membuka identitas Tergugat II sebagai pemilik channel dan memerintahkan Tergugat I untuk menghapus dan menutup seluruh channel yang diduga mengedarkan surat kabar penggugat dalam waktu 48 jam. Layanan aplikasi Telegram memang telah memiliki mekanisme laporan pengaduan pelanggaran hak cipta berupa Telegram DMCA *Anti-Piracy* *Solutions* yang dapat diakses pada laman https://www.telegramdmca.com dan mengklaim bahwa penghapusan konten dapat dilakukan dalam 48 jam sejak adanya laporan.[[37]](#footnote-37)

Dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengaduan yang dimiliki oleh Telegram belum berjalan dengan efektif sehingga menimbulkan kerugian lebih besar dari yang seharusnya dapat dihentikan lebih awal. Dalam kasus ini Pemilik/Pemegang Hak Cipta atas surat kabar Dainik Jagran telah melakukan inisiatif membuat laporan pengaduan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 9 April 2020, 16 April 2020, 30 April 2020 dan 1 Mei 2020. Namun demikian, Telegram tidak memberikan tanggapan apapun terhadap 4 (empat) laporan tersebut. Tidak adanya tindakan cepat dari Telegram menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin tidak terbendung sehingga potensi keuntungan yang hilang pun semakin membesar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengikut channel pada tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 18.989 *subscribers* dan dalam dua hari meningkat hingga 19.239 *subscribers*.

Pada tanggal 25 Mei 2020 pihak Telegram memberikan tanggapan setelah Jagran Prakashan Limited mengirimkan salinan gugatan pada tanggal 23 Mei 2020 kepada Telegram. Dalam tanggapannya Telegram menyatakan bahwa channel-channel yang diduga telah mengedarkan surat kabar digital tersebut telah ditutup. Namun demikian, Penggugat menemukan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 channel tersebut masih aktif.

Dalam hal ini, Telegram tidak memenuhi persyaratan yaitu untuk segera menghapus atau menutup akses atas konten yang melanggar hak cipta setelah mendapatkan notifikasi adanya pelanggaran. Dengan demikian, Telegram tidak dapat menggunakan alasan sebagai penyedia jasa perantara *(intermediasi)* untuk memperoleh pembatasan pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan *safe harbour* menurut ketentuan hukum di India. Oleh karenanya, secara prinsip Telegram sebagai penyedia layanan perantara *(intermediasi)* pada kasus ini dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Mengacu pada Pasal 99 ayat (1) UU HC, pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak Telegram. Selain itu, mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pihak penyelenggara sistem elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, pihak pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan kerugian.

Sebagai penyelenggara sistem elektronik aplikasi Telegram tidak bisa membiarkan suburnya pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui aplikasinya. Karena pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta, maka dari itu penyelenggara sistem elektronik seperti aplikasi Telegram memiliki tanggungjawab untuk mencegah agar perilaku penggunanya tidak merugikan pemegang hak cipta dan melaksanakan aktifitas bisnisnya berdasarkan moral dan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pihak yang merasa dirugikan berhak meminta pertanggungjawaban kepada aplikasi Telegram.

1. Penyelesaian Sengketa Atas Unggahan Film Bajakan Yang Terjadi Melalui Public Channel Telegram

Film merupakan salah satu karya intelektual yang dilindungi dalam Undang-Undangtermasuk dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya yang berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.[[38]](#footnote-38)

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE pengertian Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka film merupakan dokumen elektronik yang dilindungi dalam Undang-Undang ITE.

Seiring berkembangnya jaman, kehadiran aplikasi untuk bertukar pesan yaitu Telegram dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menonton film yang memiliki hak cipta, dengan memanfaatkan fasilitas berupa *Public Channel* pada aplikasi tersebut.

Dalam hal hak pencipta terkait film yang disebarluaskan melalui aplikasi telegram merupakan dampak negatif dari canggihnya teknologi masa kini, dampak negatif ini paling dirasakan oleh pemilik film berhak cipta, baik dari segi moril maupun materiil.[[39]](#footnote-39) Terlebih tidak adanya ijin ataupun perjanjian tertulis dari pemilik hak cipta dengan aplikasi Telegram agar karyanya dapat disebarluaskan melalui aplikasi tersebut, sehingga sangat berdampak bagi pemilik hak cipta yang tidak menerima royalti atas hasil ciptaan dan karya yang telah di hasilkan.

Menurut analisa penulis, dalam hal ini penyebaran film berhak cipta yang dilakukan melalui aplikasi Telegram telah menyalahi aturan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, maka pihak aplikasi Telegram harus siap dalam mempertanggungjawabkan segala hal termasuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan melalui dua yaitu jalur non-pengadilan atau jalur pengadilan. Mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat pada pasal 95 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Penjelasan pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menerangkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Sementara itu, dalam penjelasan yang sama diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsoliasi.

* 1. **Penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non-litigasi**

Indonesia membagi upaya penyelesaian sengketa perdata ke dalam dua cara. Pertama, melalui jalur pengadilan atau dikenal sebagai jalur litigasi sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata. Kedua, melalui penyelesaian di luar pengadilan atau jalur non litigasi. Salah satu penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ialah alternatif penyelesaian sengketa, sebagai contoh yaitu melalui lembaga arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-pengadilan. Arbitrase di bidang kekayaan intelektual bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan kekayaan intelektual ditengah semakin meningkatnya komersialisasi asset kekayaan intelektual atas dasar kepentingan ekonomi yang semakin tinggi. Secara umum arbitrase adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang impersial atau disebut arbiter untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat.

Dari pengertian ini terdapat tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu :

1. adanya suatu sengketa
2. kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak ketiga
3. putusan final dan mengikat akan dijatuhkan

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-pengadilan memiliki kelebihan yaitu hasil kesepakatan yang menghasilkan “*win-win solution*” dengan tetap terjalinnya hubungan baik antar para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase selain menganut prinsip *win-win solution* adalah prosesnya yang lebih cepat dan tidak bertele-tele karena tidak ada proses banding maupun kasasi. Lembaga di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual melalui jalur di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang dibentuk pada tahun 2011.

Penyelesaian melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Salah satunya adalah terdapat jaminan kerahasiaan *(confidentialy)* atau dikenal juga *the right to privacy*. Hal ini dikarenakan proses arbitrase yang tertutup sehingga tidak terdapat putusan yang dipublikasikan seperti apabila melalui proses pengadilan. Selain itu prosesnya juga lebih cepat dan yang terbaik dari semuanya adalah putusan yang bersifat final sehingga tidak diperlukan mengajukan upaya hukum lain.

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.[[40]](#footnote-40) BANI mempunyai status hukum yang otonom, bebas dan independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, kekuatan dari luar manapun dan kekuasaan apapun bentuk dan sifatnya. Asas otonomi, kemerdekaan dan kebebasan adalah untuk menjamin bahwa BANI sebagai lembaga Peradilan Arbitrase, sama seperti lembaga Peradilan Umum, dapat berdiri diatas atau disamping segala pihak yang bersengketa, bersikap objektif, adil dan jujur, atas dasar hukum dan keyakinan yang bersih dan murni.[[41]](#footnote-41) BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi.

Tidak semua sengketa dapat di proses oleh BANI. Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan pemutusannya oleh BANI maka di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dimuat suatu pasal yang berisikan klausula arbitrase. Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Keberadaan perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan, dan pengadilan pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Penunjukan BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.[[42]](#footnote-42)

Karateristik penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui BANI yaitu:

1. Perlu adanya akta de kompromitendo yang menunjuk BANI sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak kekayaan intelektual.
2. Perlu dibuat akta compromise bilamana tidak ada akta kompromitendo. Akta kompromitendo merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa setelah terjadi sengketa dan belum pernah membuat akta de kompromitendo.
3. Sengketa diselesaikan dengan menggunakan arbiter, jika para pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase. Arbiter di pilih oleh para pihak. Arbiter berjumlah ganjil. Satu arbiter atau tiga arbiter.
4. Penyelesaian sengketa relatif cepat, ketentuan 180 hari sudah ada putusan sehingga bisnis tidak akan lama terganggu.
5. Kerahasiaan para pihak terjaga

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui BANI memliki keunggulan dibandingkan penyelesaian snegketa melalui litigasi (pengadilan). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui BANI:

1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin baik bagi pemilik kekayaan intelektual maupun bagi si pelanggar kekayaan intelektual;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Kasus sengketa hak kekayaan intelektual yang diselesaikan oleh BANI tidak memiliki problematic yang sangat tinggi. Hal ini mengingat arbiter yang dimiliki oleh BANI merupakan arbiter yang handal dan berkompeten untuk dapat menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual.

**B. Penyelesaian sengketa jalur pengadilan/litigasi**

Penyelesaian melalui jalur pengadilan merupakan pilihan terakhir apabila upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-pengadilan tidak berhasil. Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan menitikberatkan pada pemberian sanksi yang dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan upaya perdata, pidana. Pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang sah.

Dalam konteks penegakan hukum pada dunia maya di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia (RI) telah mensyahkan peraturan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, perorangan, atau badan hukum baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.[[43]](#footnote-43)

* + - * 1. Pertanggungjawaban Secara Perdata

Mengenai penyelesaian sengketa secara perdata menurut pasal 38 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Maka dalam hal ini pihak pemegang hak cipta yang merasa dirugikan atas pembajakan film melalui aplikasi Telegram dapat mengajukan gugatan terhadap Telegram selaku penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan kerugian.

Pembebanan tanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam konsep perbuatan melawan hukum dikenal dalam pasal 1367 KUHPerdata. Sebagaimana menurut Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang berada di bawah pengawasannya.

Pada pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta menerangkan : Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Kemudian Pasal 1 angka 25 UU Hak Cipta menyatakan bahwa, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. Gugatan secara perdata dapat dilakukan apabila telah melakukan somasi sebanyak tiga kali untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.

* + - * 1. Pertanggungjawaban Secara Pidana

Dalam ranah hukum pidana dikenal teori pertanggungjawaban pidana, menurut **Van Hamel**, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dalam hukum pidana dikenal pula tindak pidana penyertaan atau disebut *deelneming*. Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) yaitu meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.[[44]](#footnote-44)

Terdapat beberapa bentuk dari penyertaan salah satu bentuk dari penyertaan yaitu pembantuan yang diatur di dalam Pasal 56 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik.

Perbuatan Telegram dalam membiarkan maraknya pembajakan pada penyelenggaraan sistem elektroniknyanya tanpa melakukan pengawasan yang ketat telah mempermudah dan memperlancar terjadinya suatu tindak pidana pembajakan film. Dalam pasal 56 ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan; barang siapa dengan sangaja memberikan kesempatan, daya dan upaya, atau keterangan untuk melakukan kerjahatan itu. Dengan demikian perbuatan Telegram tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana dengan dikualifikasikan suatu bentuk penyertaan dalam hal ini merupakan bentuk pembantuan yang diatur dalam pasal 56 ayat (2) KUH Pidana.

1. **Sanksi Administratif**

Selain sanksi perdata dan pidana, terdapat pula sanksi administratif. Mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berisi ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dalam pasal 100 ayat (2) disebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Denda administratif
3. Penghentian sementara
4. Pemutusan akses; dan/atau
5. Dikeluarkan dari daftar.

Dalam pasal (3) menyebutkan bahwa sanksi administratif diberikan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selantujnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dan perdata.

Sejauh ini di Indonesia belum ada kasus pemegang hak cipta yang menggugat pihak Telegram atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan penggunanya. Hal tersebut menggambarkan bahwa saat ini masih kurangnya pemahaman akan pentingnya memperjuangkan Hak Kekayaan Intelektual bagi karya yang memiliki hak cipta, sehingga dengan tidak diberikannya sanksi bagi pihak penyelenggara sistem elektronik yang membiarkan terjadinya pelanggaran pada aplikasinya membuat dampak yang berkelanjutan yaitu terus bertambahnya pelanggaran hak cipta berupa penyebaran film bajakan melalui penyelenggara sistem elektronik seperti Telegram.

Penyelenggara sistem elektronik seperti Telegram maupun aplikasi lainnya tentunya tidak bisa diam saja membiarkan suburnya pelanggaran hak cipta yang terjadi pada sistem elektroniknya dan meraup keuntungan dari aktifitas tersebut. Karena aktifitas bisnis mereka dapat mengancam hak pemilik hak cipta dari segi moril maupun materil, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang ada penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban hukum untuk mencegah agar perilaku penggunanya tidak merugikan pemegang hak cipta dan melaksanakan aktifitas bisnisnya berdasarkan moral. Bentuk dari kewajiban hukum yang harus dipatuhi tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai hak cipta.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini telah sampai pada beberapa kesimpulan atas uraian pembahasan yang telah diteliti sebelumnya, sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan pihak Telegram adalah adanya penyebarluasan karya cipta berupa film yang dilakukan secara gratis dan dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan dilakukan melalui fitur *Public Channel* yang ada pada aplikasi Telegram. Pihak Telegram telah lalai dalam melakukan kewajiban untuk mengawasi dan memastikan agar penyelenggaraan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta.
2. Telegram memiliki kewajiban untuk memastikan sistem elektroniknya tidak memuat dokumen elektronik yang dilarang dalam hal ini adalah film-film bajakan yang diunggah melalui *Public Channel* pada aplikasi Telegram. Sesuai peraturan perundang-undangan penyelenggara sistem elektronik yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non-litigasi maupun litigasi berupa gugatan secara perdata, pidana, dan administratif.
3. Saran

Mengingat pembahasan serta uraian dan kesimpulan telah disebutkan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis, sebagai berikut :

1. Masyarakat maupun pemegang hak cipta harus lebih sadar betapa pentingnya untuk menghargai dan melindungi Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu karya film. Selain itu Negara juga harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dalam bidang teknologi informasi yang saat ini perlu mendapatkan perhatian lebih agar dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat memudahkan keseharian ini agar tidak turut menimbulkan kerugian terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.
2. Pihak aplikasi Telegram harus lebih memperhatikan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem elektronik pada aplikasi karena pembajakan film yang terjadi pada aplikasinya dilakukan dengan cara terang-terangan tanpa adanya peringatan maupun pengawasan yang ketat sehingga penggunaan fasilitas berupa *Public Channel* pada aplikasi Telegram dapat dengan mudah untuk melakukan pelanggaran berupa mengunggah film-film bajakan yang seharusnya disaksikan secara resmi melalui bioskop maupun platform resmi yang telah disediakan dan tentunya tidak merugikan pihak pemegang hak cipta karena mendapatkan haknya yaitu hak moral dan hak ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Djumhana, M., 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo S., 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad, Abdulkadir, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhdar, M., 2019. *Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif* *dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.

Priyatna, Abdurrasyid, 2002. *Arbitarse & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, 2005. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1365*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sidik, Jafar, 2016. *Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis*. Bandung: Binara Padaasih.

Usanti TP, Hernoko AY, Agustin E., 2012. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Surabaya: FH Universitas Airlangga.

**Jurnal**

Abadi Tinton, F. Elias Rodrigo, dan Rompis Tonny. Pemidanaan Bagi Pengajur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP. Lex Crimen, Vol. X, No. 7, Juni 2021, hlm. 16-26.

Diza Nuruzzhahrah, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT), Technology and Economics Law Journal, Volume 1, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 51-64.

Dyani, Vina Akfa., Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 162-176.

Kuspraningrum, Emilda. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL *Model Law On Electronic Commerce*. Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 64-76.

Megahayati, K., Amirulloh, M. and Muchtar, H.N., Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 1-16.

Teresia, R., Perlindungan Hukum hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet, Riau: Universitas Riau, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 1-15.

Yanto, O., Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). Yustisia Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm. 746-760.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376)

**Internet**

CNN Indonesia, (2021, 13 Januari), Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna: Naik Signifikan, (*Online*), Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan, diakses 17 Mei 2022.

Kompas (2022, 31 Januari), Layangan Putus Jadi Serial WeTV yang paling banyak dibajak. (*Online*) Tersedia: <https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/31/112542766/layangan-putus-jadi-serial-wetv-yang-paling-banyak-dibajak>, diakses pada 3 Februari 2022.

Tribun Kaltim, (2022, 31 Januari), WeTv minta pemerintah blokir Telegram, gara-gara layangan putus jadi yang paling banyak dibajak, (*Online*) Tersedia: <https://kaltim.tribunnews.com/2022/01/31/wetv-minta-pemerintah-blokir-telegram-gara-gara-layangan-putus-jadi-yang-paling-banyak-dibajak>, diakses pada 3 Maret 2022.

Liputan6, (2021, 18 September) Apa itu Telegram? Pahami Kelebihan yang Dimiliki, (*Online*), Tersdia: https://m.liputan6.com/hot/read/4659522/apa-itu-telegram-pahami-kelebihan-yang-dimiliki, diakses 11 Mei 2022

Smartlegal.id, (2021, 14 April), Hati-Hati! Karena 3 Hal ini Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat Bisa Kena Sanksi, Tersedia: <https://smartlegal.id/pse/2021/04/14/hati-hati-karena-3-hal-ini-penyelenggara-sistem-elektronik-pse-privat-bisa-kena-sanksi/>, diakses 1 April 2022.

1. Emilda Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce. Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 64-76. [↑](#footnote-ref-1)
2. CNN Indonesia, (13 Januari 2021), Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna: Naik Signifikan, (online) melalui https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan, diakses tanggal 23 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kompas (2022, 31 Januari), Layangan Putus Jadi Serial WeTV yang paling banyak dibajak. (*Online*) Tersedia: <https://www.kompas.com/hype/read/2022/01/31/112542766/layangan-putus-jadi-serial-wetv-yang-paling-banyak-dibajak>, diakses pada 3 Februari 2022. [↑](#footnote-ref-3)
4. Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm. 746-760. [↑](#footnote-ref-4)
5. Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perbuatan-melawan-hukum-menurut-para-ahli/#:~:text=Beberapa%20definisi%20Munir%20Fuady%20yang,melawan%20hukum%20adalah%20sebagai%20berikut%20%3A&text=Sesuatu%20perbuatan%20atau%20tidak%20berbuat,dituntut%20oleh%20pihak%20yang%20dirugikan>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 162-176. [↑](#footnote-ref-7)
8. Khairrunisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, dalam Justia Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Volume 20 Nomor 2, Ambon, 2014, hlm 22. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rita Teresia, Perlindungan Hukum hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet, Riau: Universitas Riau, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 1-15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dadan Samsudin, 2016, Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Ham, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jannati, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bintang Sanusi, 2007, *Hak Cipta*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-14)
15. Golkar Pangarso, 2015, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 188. [↑](#footnote-ref-15)
16. Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2003, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual),* Bandung: PT. Alumni, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhamad Muhdar, 2019, *Penelitian Doctrinal dan Non Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Samarinda : Mulawarman University Press, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kemala Megahayati, Muhammad Amirullah dan Helitha Novianty Muchtar, Perlindungan Hukum Sinematografi terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 1-16. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [↑](#footnote-ref-19)
20. CNN Indonesia, (2021, 13 Januari), Bos Telegram Respons 500 Juta Pengguna: Naik Signifikan, (*Online*), Tersedia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210113123620-185-593080/bos-telegram-respons-500-juta-pengguna-naik-signifikan, diakses 17 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-20)
21. Penutupan akun yang menyebar film gratis di Telegram, <https://www.kompasiana.com/laurenciaaline/5ff314578ede482b421139a2/penutupan-akun-yang-menyebar-film-gratis-di-telegram>, diakses 7 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 119. [↑](#footnote-ref-22)
23. Megahayati.*Op.cit.* [↑](#footnote-ref-23)
24. Tribun Kaltim, (2022, 31 Januari), WeTv minta pemerintah blokir Telegram, gara-gara layangan putus jadi yang paling banyak dibajak, (*Online*) Tersedia: <https://kaltim.tribunnews.com/2022/01/31/wetv-minta-pemerintah-blokir-telegram-gara-gara-layangan-putus-jadi-yang-paling-banyak-dibajak>, diakses pada 3 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kompasiana, (4 Januari 2021), Penutupan akun yang menyebar film gratis di Telegram, melalui <https://www.kompasiana.com/laurenciaaline/5ff314578ede482b421139a2/penutupan-akun-yang-menyebar-film-gratis-di-telegram>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-25)
26. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2005, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1365*, cetakan ke – 36, Jakarta: Pradnya Paramita. [↑](#footnote-ref-26)
27. Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Bandung: Citra Aditya Bakti. [↑](#footnote-ref-27)
28. Subekti dan R. Tjitrisudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. [↑](#footnote-ref-28)
29. Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-29)
30. H.F.A. Volmar, 2004, *Pengantar Study Hukum Perdata (diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata),* Jakarta: Rajawali Pers. [↑](#footnote-ref-30)
31. Munir Fuady, *Op.Cit*. hlm.14 [↑](#footnote-ref-31)
32. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 346. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. [↑](#footnote-ref-33)
34. Munir Fuady, Op.cit. [↑](#footnote-ref-34)
35. Smartlegal.id, (2021, 14 April), Hati-Hati! Karena 3 Hal ini Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Privat Bisa Kena Sanksi, Tersedia: <https://smartlegal.id/pse/2021/04/14/hati-hati-karena-3-hal-ini-penyelenggara-sistem-elektronik-pse-privat-bisa-kena-sanksi/>, diakses 1 April 2022. [↑](#footnote-ref-35)
36. Edmon Makarim, Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Good Electronic Governance), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Desember 2009, hlm. 259-260. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nuruzzhahrah Diza, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT), Technology and Economics Law Journal, Volume 1, Nomor 1, Februari 2022, hlm. 51-64. [↑](#footnote-ref-37)
38. Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58) [↑](#footnote-ref-38)
39. Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2021. hlm. 1-16. [↑](#footnote-ref-39)
40. Jafar Sidik, 2016, *Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis*, Bandung: Binara Padaasih. [↑](#footnote-ref-40)
41. Abdurrasyid Priyatna, 2002, *Arbitarse & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sulistianingsih, Dewi, dan Mumammad Shidqon Prabowo, Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, QISTIE, Vol. 12, no. 2, 2019, hal. 166-177. [↑](#footnote-ref-42)
43. Imas Rosidawati dan Edy Santoso, Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik, Jurnal Litigasi, Vol. 14, No.1, 2013, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-43)
44. Tinton Abadi, Rodrigo F. Elias, dan Tonny Rompis, Pemidanaan Bagi Pengajur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP, Lex Crimen, Vol. X, No. 7, Juni 2021, hlm. 16-26. [↑](#footnote-ref-44)